

## EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PENGENDALIAN INFLASI

Dewi Restu Mangeswuri\*

11

### Abstrak

Besaran anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Alokasi tersebut hanya beda tipis dibandingkan anggaran serupa pada awal pandemi Covid-19 (tahun 2020) yang mencapai Rp497,9 triliun. Program bansos menjadi bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah. Anggaran pemerintah untuk bansos yang besar tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dapat menyebabkan inflasi. Tulisan ini bertujuan mengkaji jenis-jenis bansos yang diberikan pada tahun 2024 serta efektivitas pemberian bansos dalam pengendalian inflasi. Dua jenis bansos antara lain bantuan beras 10 kg dan bantuan langsung tunai. Untuk mencapai keseimbangan antara bansos dan pengendalian inflasi, selain melibatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, diperlukan evaluasi program secara berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi ekonomi yang terus berubah. Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu memastikan dan mengawasi penggunaan anggaran bansos agar penyalurannya tepat sasaran. Upaya ini penting agar bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

### Pendahuluan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 mencapai Rp496,8 triliun (Agnes Theodora, 2024). Salah satu bansos pada tahun 2024 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jumlah itu naik 12.5% atau Rp20,5 triliun

dari alokasi serupa dari tahun sebelumnya yang disalurkan pada saat pandemi Covid-19. Kenaikan anggaran itu telah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR RI.

BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN sebesar Rp11,25 triliun. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk

\* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: dewi.mangeswuri@dpr.go.id.



sejak tiga bulan itu akan dirapel pada bulan Februari. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi. Presiden Jokowi bersama pemerintah akan terus menyalurkan pada KPM hingga bulan Maret 2024. Namun, kemungkinan besar akan berlanjut hingga Juni 2024.

Bansos lainnya adalah BLT. Pemerintah menyalurkan dana melalui BLT, akibat musim kemarau yang berkepanjangan. BLT ini disalurkan ke 18,8 juta KPM (antaranews, 2024). Presiden Jokowi menegaskan penyaluran BLT ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Nilainya mencapai Rp400.000 per KPM.

Bansos di bidang pendidikan juga diberikan pemerintah, yaitu program Indonesia pintar (PIP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan PIP akan tetap ada pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK. Jumlah bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp1 juta pada 2023 menjadi Rp1,8 juta tahun 2024.

Tujuan utama program bansos, baik tunai maupun nontunai adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pada keluarga sangat miskin dan miskin. Bansos dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program bansos dan agar bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima.

### **Efektivitas Pemberian Bansos dalam Pengendalian Inflasi**

Pengaruh program bansos terhadap inflasi dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, termasuk desain program, skala implementasi, dan kondisi ekonomi. Jika program bansos menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat penerima bantuan, hal ini dapat meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Jika peningkatan permintaan melebihi kapasitas produksi, ini dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada inflasi (Asep dan Bakhtiar, 2018: 7).

Beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas bansos antara lain: *pertama*, memperbarui dan memperbaiki sistem pendataan untuk mengidentifikasi dengan akurat kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Teknologi informasi harus digunakan untuk memudahkan pemutakhiran dan pemantauan data. *Kedua*, merancang program bansos dengan perencanaan yang matang, termasuk analisis kebutuhan dan tujuan yang jelas. Masyarakat sebaiknya

ikut dilibatkan dalam proses perencanaan untuk memahami kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, melakukan evaluasi dan monitoring rutin terhadap program bansos untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara kontinu. *Keempat*, meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penyaluran dan pelaksanaan program bansos. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan efisiensi sumber daya.

Menurut Eliza Mardian, peneliti CORE, peran APBN dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin sangat penting untuk diperhatikan. Sangat disayangkan alokasi anggaran yang cenderung lebih besar untuk bansos dibandingkan upaya mendorong ekonomi produktif (antaranews, 2024). Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah harus menjaga ketersediaan suplai yang memadai dan memastikan kelancaran distribusi. Pemerintah harus mencari solusi agar masyarakat tidak bergantung terus pada bansos.

Pemerintah perlu memerhatikan keseimbangan anggaran negara dalam pelaksanaan program bansos. Sebaliknya, program bansos yang berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat penerima bantuan dapat memiliki dampak yang menghambat inflasi. Meningkatnya keterampilan dan kapasitas produktif keluarga secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

seimbang. Jika pengeluaran untuk bansos tidak seimbang dengan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat menciptakan tekanan inflasi. Bank sentral dapat merespons pengaruh program bansos terhadap inflasi dengan menyesuaikan kebijakan moneter. Jika peningkatan daya beli dari bansos mengarah pada potensi risiko inflasi yang tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan (Asep dan Bakhtiar, 2018: 7).

Koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal (terkait program bansos) dan kebijakan moneter dapat membantu mencegah dampak inflasi yang merugikan. Sinergitas yang efektif antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk mencapai keseimbangan tersebut. Keseimbangan antara bansos dan pengendalian inflasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian, merugikan daya beli masyarakat, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

## **Penutup**

Pemberian bansos bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang membutuhkan. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengendalian inflasi, peningkatan daya beli ini dapat mendorong permintaan yang melebihi pasokan, menyebabkan kenaikan harga, dan mengurangi manfaat yang diperoleh masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara bansos

dan pengendalian inflasi, selain melibatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, diperlukan juga evaluasi program secara berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi ekonomi yang terus berubah. Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu memastikan dan mengawasi pemberian bansos agar penyalurannya tepat sasaran. Upaya ini penting agar bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

### Referensi

- Agnes Theodora. (2024, Februari 2). Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi Menuju Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024.
- Asep Nurwanda dan Bakhtiar Rifai. (2018). Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 (No.3), 1-18. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.385>.
- Ekonom: BLT Bantu Daya Beli Masyarakat Kelas Bawah Akibat Inflasi. (2024, Februari 2). Antaranews. <https://www.antarane.ws.com/berita/3944367/ekonom-blt-bantu-daya-beli-masyarakat-kelas-bawah-akibat-inflasi>.
- Kholida Qothrunnada. (2024, Januari 28). Cara Cek Bansos Kemensos dan Daftar Jadwal Cairnya di Tahun 2024. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7163067/cara-cek-bansos-kemensos-dan-daftar-jadwal-cairnya-di-tahun-2024>.
- Tim CNN Indonesia. (2024, Februari 2). Alasan Sri Mulyani Minta Warga Tak Mampu Tahu Asal-usul Uang Bansos. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240202073618-532-1057492/alasan-sri-mulyani-minta-warga-tak-mampu-tahu-asal-usul-uang-bansos>.